



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan guna sebagai pelaksanaan Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
5. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat,

pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.

- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 55 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 November 2022

- KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
- 000 UMUM
- 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
 - 000.1.1 Telekomunikasi
 - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
 - 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
 - 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
 - 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
 - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
 - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
 - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
 - 000.1.8.2 Penghijauan
 - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
 - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
 - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
 - 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
 - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
 - 000.1.9.2 Pemasangan
 - 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
 - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
 - 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,

Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

- 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
 - 00.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
- 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
 - 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
 - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
- 000.2.3 Distribusi
 - 000.2.3.1 Barang habis pakai
 - 000.2.3.2 Barang milik daerah
- 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
- 000.2.5 Pengelolaan Data base Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

- 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
- 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
- 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
- 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
- 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
- 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3	Koleksi Pustaka
000.4.3.1	Pembelian
000.4.3.2	Hibah
000.4.3.3	Hadiah
000.4.3.4	Tukar Menukar
000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
000.4.3.6	Terbitan Internal
000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6	Layanan Perpustakaan
000.4.6.1	Keanggotaan
000.4.6.2	Peminjaman
000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan
000.4.7.1	MoU
000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
000.4.8.1	Pengembangan situs web
000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data keperustakaan digital
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10	Konservasi
000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12	Transformasi Digital

- 000.4.13 Kurasi Digital
- 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
 - 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 000.5 KEARSIPAN
 - 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
 - 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
 - 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
 - 000.5.2.5 Data Base Arsiparis
 - 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
 - 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
 - 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
 - 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
 - 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
 - 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

- 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
- 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
- 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
- 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
- 000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)
- 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
- 000.5.6 Penyusutan Arsip
 - 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
 - 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.
 - 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari

- Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
- 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
- 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
- 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
- 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
- 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain : Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
- 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
- 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
- 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
- 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
- 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

- 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
- 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
 - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 000.5.15.3 Sanksi
- 000.6 PERSANDIAN
 - 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.6.2 Pengamanan persandian
 - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan krypto
 - 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan krypto
 - 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
 - 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 000.6.3.3 Pelaksanaan
 - 000.6.3.4 Pelaporan
 - 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
 - 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
 - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.6.5.7 Pelaporan
- 000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 - 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang
 - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional

	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
000.8.2	Uraian Jabatan	
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja

000.8.3	Ketatalaksanaan
000.8.3.1	Proses Bisnis
000.8.3.2	Standar Pelayanan
000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4	Pelayanan Publik
000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000.8.6.1	Budaya Kerja
000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi
000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6.1	Data
000.9.6.2	Statistik
000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop
100	PEMERINTAHAN
100.1	OTONOMI DAERAH
100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah

- | | | |
|---------|-----------|---|
| | | Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) |
| 100.1.4 | | Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) |
| | 100.1.4.1 | Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah |
| | 100.1.4.2 | Administrasi Kepala Daerah dan DPRD |
| | 100.1.4.3 | Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan |
| | 100.1.4.4 | Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) |
| | 100.1.4.5 | Assosiasi Daerah |
| 100.1.5 | | Otonomi khusus dan daerah istimewa |
| 100.1.6 | | Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) |
| | 100.1.6.1 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| | 100.1.6.2 | Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
| | 100.1.6.3 | Pengembangan Kapasitas Daerah |
| 100.1.7 | | LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) |
| 100.2 | | PEMERINTAHAN UMUM |
| | 100.2.1 | Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah |
| | 100.2.2 | Dekonsentrasi dan Kerjasama |
| | 100.2.1 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan |
| | 100.2.2 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah |
| | 100.2.3 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah |
| | 100.2.4 | Fasilitasi Kecamatan |
| | 100.2.5 | Fasilitasi Pelayanan Umum |
| 100.2.3 | | Wilayah Administrasi dan Perbatasan |

		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
	100.2.3.5		Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1		Program Legislasi
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
	100.3.3		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Bupati, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
	100.3.4		Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
		100.3.4.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
		100.3.4.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
		100.3.4.3	Keputusan / Ketetapan Walikota
		100.3.4.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.4.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
		100.3.4.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.5		Instruksi / Surat Edaran
		100.3.5.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
		100.3.5.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
		100.3.5.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
		100.3.5.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.6		Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
	100.3.7		Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
		100.3.7.1	Dalam Negeri
		100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8		Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang

- dijadikan referensi)
- 100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
 - 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi
Pemberian bantuan/ konsultasi hukum
(Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
 - 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
 - 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
 - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
 - 100.3.11.4 Perburuhan
 - 100.3.11.5 Arbitrase
 - 100.3.11.6 Sengketa Adat
 - 100.3.12 Perijinan
 - 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 100.3.13.1 Hak Cipta
 - 100.3.13.2 Hak Paten
 - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
 - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
 - 100.3.13.5 Hak Merk
 - 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak
- 200 POLITIK
- 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 - 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
 - 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
 - 200.1.3.6 Lembaga Asing
 - 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan

		Kemasyarakatan
		200.1.4.1 Ketahanan Seni
		200.1.4.2 Ketahanan Budaya
		200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
		200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
		200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
		200.1.4.6 Fasilitasi
		200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
		200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
		200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
		200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
		200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
200.1.5		Politik Dalam Negeri
		200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
		200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6 Pemerintah Daerah
		200.1.5.7 Database Parpol
		200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9 Pemilihan Umum
200.1.6		Ketahanan Ekonomi
		200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU	
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
		200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	270.04.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai

- 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
 - 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
 - 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
 - 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
 - 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
 - 200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
 - 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 - 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
 - 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
 - 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
 - 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
 - 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
 - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
 - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
 - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.4 Permayarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
 - 300.2.2.6 Registrasi BEACON

- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan
 - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
 - 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.3 Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.4 Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
 - 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi BEACON
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporoan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
 - 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya

	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3		Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4		Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat

	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1	Data gender
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap

	Anak
400.2.4.2	Data perlindungan anak
400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3	PENDIDIKAN
400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2	Pelatihan Sosial
400.3.2.3	Peringatan Hari anak
400.3.2.4	Block Grant
400.3.3	Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3	Pembinaan Program
400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5	Pameran
400.3.3.6	Rakor
400.3.3.7	Sosialisasi
400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2	Block Grant
400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4	Lomba, penghargaan,

			penganugerahan
		400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
		400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus		
		400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
		400.3.6.2	Block Grant
		400.3.6.3	Lomba, festival
		400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
		400.3.6.5	Pendataan
		400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik		
		400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
		400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.7.3	Sertifikasi Guru
		400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
		400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
		400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas		
		400.3.8.1	Kurikulum
		400.3.8.2	Bahan Ajar
		400.3.8.3	Pelatihan
		400.3.8.4	Block grant
		400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
		400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
		400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus		
		400.3.9.1	Bahan ajar
		400.3.9.2	Petunjuk Teknis
		400.3.9.3	Block grant
		400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
		400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
		400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
		400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
		400.3.9.8	Pendataan
		400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik		
		400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
		400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
		400.3.10.3	Setifikasi Guru
		400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
		400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan

	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	Block grant
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11		Penilaian Pendidikan
	400.3.11	Penilaian Akademik
	400.3.12	Penilaian Non Akademik
	400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4		KEOLAHRAGAAN
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi
	400.4.3.1	Olahraga Massal
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga
	400.4.9.1	Industri Olahraga
	400.4.9.2	Promosi Olahraga
400.4.10		Olahraga Prestasi
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5		KEPEMUDAAN
400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
	400.5.2.3	Pengembangan
400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
	400.5.5.1	Pengkajian
	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
	400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan.Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7		Kewirausahaan
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
400.5.8		Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi

		Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kevelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	KEBUDAYAAN	
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7	KESEHATAN	
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar

	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

400.7.5	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400.7.9	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
400.7.10	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif

	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11		Penyehatan lingkungan
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12		Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400.7.13		Gizi
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14		Kesehatan ibu
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15		Kesehatan anak
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan

	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20		Kefarmasian
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25		Intelegensia Kesehatan
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26		Kesehatan Haji
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan

		pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	
400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	
400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	
400.7.27.4	Hari Kesehatan	
400.7.28	Data dan Informasi	
400.7.28.1	Statistik kesehatan	
400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	
400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	
400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	
400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	
400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	
400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan	
400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	
400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.8.2	Fasilitasi	
400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	
400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	
400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	
400.8.2.4	Kasus Keagamaan	
400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	

		400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
		400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
		400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
		400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL	
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial

	kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
400.9.9.4	Kerjasama meliputi Kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial
400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400.9.12.1	Ketahanan keluarga
400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
400.9.13.3	Penggalan dan pengembangan potensi
400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil

- 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
 - 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
 - 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
 - 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
 - 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
 - 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
 - 400.9.14.5 Bantuan Langsung
 - 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
 - 400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
 - 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
 - 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
 - 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
 - 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
 - 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan

		Pinjam
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.11.2	Pertamanan
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
	400.11.2.2	Taman Kota
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
	400.11.3.2	Pemakaman
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
	400. 11.4	Jalur Hijau
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan
	400.11.7	Pengelolaan Data
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk
	400.12.2.1	Identitas Penduduk
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar

		Negara
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3	Pencatatan Sipil	
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13	KELUARGA BERENCANA	
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data

	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
400.13.3		Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
400.13.4		Profil dan proyeksi penduduk
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5		Penetapan parameter pengendalian penduduk
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
400.13.6		Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
400.13.7		Pengembangan Sistem
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8		Pengembangan Materi
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9		Monitoring dan Evaluasi
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10		Analisis Sosial
400.13.11		Analisis Ekonomi
400.13.12		Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13		Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14		Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
400.13.15		Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
400.13.16		Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.4.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.4.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan Keluarga berencana swasta
 - 400.4.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
 - 400.4.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
 - 400.4.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja

- 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
- 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - 400.4.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
 - 400.4.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.4.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.4.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok Usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan

- Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
 - 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
 - 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
 - 400.13.44 Hubungan dengan Lembaga pemerintah pusat dan provinsi
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.45 Hubungan dengan lembaga non pemerintah
 - 400.4.45.1 Pengembangan hubungan Dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.4.45.2 Penguatan hubungan dengan Lembaga non pemerintah
 - 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
 - 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan pola sistempencatatan dan pelaporan

	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50		Pengumpulan dan pengolahan data
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	400.13.51.2	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	400.13.51.3	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
	400.13.51.4	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop
 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT		
	400.14.1	Keprotokolan
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media
	400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
	400.14.4.1	Kliping koran
	400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat
	400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan
400.14.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
400.14.6		Dengar pendapat/hearing DPRD
400.14.7		Bahan/materi pidato/ sidang Muspida Provinsi/ Kota/ Kabupaten

- 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran/sayembara/lomba/festival,
pembuatan spanduk dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela
Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang
dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan
Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan
Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan
Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan
Teknis Usaha Dagang Kecil
Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran
Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
 - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
 - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi

	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5	Bimbingan Teknis	
500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha

	Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum
500.3.2.2	Koperasi
500.3.2.3	Tata Laksana Koprerasi dan UKM
500.3.2.4	Keanggotaan Koperasi Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan
500.3.4.1	Program Pendanaan
500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500.3.4.3	Urusan Permodalan
500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan
500.3.4.6	Kredit Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDP)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
500.3.5.2	Ekspor dan Impor
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1	Penelitian Koperasi
500.3.8.2	Penelitian UKM

	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11		Monitoring dan Evaluasi
500.4		KEHUTANAN
500.4.1		Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.4.2		Penyuluhan
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Deseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3		Planologi Kehutanan
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Penguatan dan Penataan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4		Bina Usaha Kehutanan
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK

500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3	Kerjasama
500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan
500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi non kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri

	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan

	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7		Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5		KELAUTAN DAN PERIKANAN
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2	Perikanan Tangkap
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat

		Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3		Perikanan Budidaya
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi

	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5		Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil

	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Perikanan	Sumber Daya Kelautan Dan
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	PengawasanPengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan

	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN	
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.6.2	Perlindungan hortikultura
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan

		Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6		Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7		Pupuk Pestisida
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8		Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9		Perbenihan Tanaman Pangan
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10		Budidaya Serealia
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12		Tanaman Pangan
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
500.6.13		Pascapanen Tanaman Pangan
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain

	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14		Pengolahan Hasil Pertanian
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15		Mutu dan Standarasi
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17		Pemasaran Domestik
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20		Diseminasi
500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26		Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa

	500.6.26.4	Hak Merek
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28		Pelayanan Hukum
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29		Karantina Pertanian
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30		Bimbingan Teknis
500.6.31		Evaluasi
500.7		PETERNAKAN
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain:

		Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.3	Bimbingan Teknis	
500.7.4	Evaluasi	
500.8	PERKEBUNAN	
500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.8.2	Tanaman Semusim	
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4	Tanaman Tahunan	
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5	Perlindungan Perkebunan	
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu

	500.8.5.4	Tumbuhan Tanaman Tahunan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6		Pascapanen dan Pembinaan Usaha
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7		Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8		Evaluasi Perkebunan
500.9		PERINDUSTRIAN
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
	500.9.2.1	Industri Manufaktur
	500.9.2.2	Industri Agro
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3		Promosi Industri
	500.9.3.1	Industri Manufaktur
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4		Standarisasi dan Teknologi
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5		Hak dan Kekayaan Intelektual
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6		Industri Hijau
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7		Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

- 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
- 500.9.12 Standarisasi
 - 500.9.12.1 Standar
 - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
 - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi
- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
 - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
 - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.2.3 Pertambangan
 - 500.10.2.4 Panas Bumi
 - 500.10.2.5 Geosains
 - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
 - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
 - 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian

	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4		Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5		Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan

		data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasaha), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan

		dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	
500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT	
500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	
500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	
500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	
500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	
500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	
500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi	
500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urut Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka	

		Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur	Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	PengadaanPembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi P embangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi	Terbarukan dan Konservasi Energi
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program PemanfaatanEnergi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las

	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas Usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)

	500.10.14.5	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
500.10.15		Konservasi Energi
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17		Bina Program Tenaga Listrik
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik

		perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenaga listrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenaga listrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

		sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan

	Batubara
500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral
500.10.26.1	Ketenagakerjaan
500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis Pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
500.10.26.16	Penghargaan usaha

- pertambangan mineral
 - 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
- 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
 - 500.10.27.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 - 500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
 - 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
 - 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
 - 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
 - 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
 - 500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
 - 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
 - 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara

- 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
- 500.10.28 Penerimaan Negara
 - 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
- 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 - 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia) / RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
 - 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
 - 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
 - 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
 - 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
 - 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia
 - 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
 - 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya

- Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan reklamasi
- 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
- 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
- 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
- 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
- 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
- 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
- 500.10.29.17 Pengawasan Teknis
- 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
- 500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
- 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.3 Dokumen penerapan / pemanfaatan / Pendayagunaan / replikasi / prototipe hasil penelitian / pengkajian/ pengembangan / inovasi
 - 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitas penelitian, pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.6 Pembinaan penelitian/ Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan

		teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.25.5	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.25.6	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia dan kelautan
	500.10.33.2	Energi kelautan dan kewilayahan penelitian energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	

- 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
- 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
- 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
 - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
 - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
 - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
 - 500.10.36.4 Penelitiandan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
- 500.11 PERHUBUNGAN
 - 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
 - 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
 - 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
 - 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan

		rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang

- 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, penertibandan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
- 500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
- 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
 - 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
 - 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
 - 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22. Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Transportasi perkotaan yang

- berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
- 500.11.22.2 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.22.3 Wilayah administrasi provinsi Lalu Lintas Perkotaan
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1. Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu

		lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
 - 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
 - 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.33 Parkir
 - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
 - 500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
 - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.12.2 Telekomunikasi
 - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
 - 500.12.3 Penyiaran
 - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
 - 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
 - 500.12.5 Pengendalian Informatika
 - 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
 - 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
 - 500.12.6 e- Government
 - 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
 - 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government

	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	

- 500.12.15.1 Jaringan
- 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
- 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi
- 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
 - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
 - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
 - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
 - 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
 - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
 - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
 - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
 - 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
 - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
 - 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
 - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
 - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitas
 - 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK	
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
	500.14.2.1	Perencanaan
	500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacaha, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedomansosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur(TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi

		tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaandokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
	500.14.3.6	Diseminashasil Survei
500.14.4	Konsolidasi	Data Statistik
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan ,Survei,dan Konsolidasi Data Statistik	
500.15	KETENAGAKERJAAN	
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program

		Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	
500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	
500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	
500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	
500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	
500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	
500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	
500.15.6	Bina Pemagangan	
500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	
500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	
500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	
500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	
500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	
500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	
500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	
500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	
500.15.8.3	Bursa Kerja	
500.15.8.4	Analisis Jabatan	
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
500.15.9.1	Antar Kerja	
500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	
500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	
500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	
500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	
500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	
500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan	

		dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan	

	Kerja	
500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	
500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	
500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	
500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	
500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaa kerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	
500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	
500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	
500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	
500.15.21.3	Bimbingan Teknis Evaluasi Pengkajian K 3	
500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	

- 500.16 PENANAMAN MODAL
 - 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
 - 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
 - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
 - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
 - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
 - 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
 - 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
 - 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
 - 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas
- 500.17 PERTANAHAN
 - 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan

- oleh Pemerintah Daerah
- 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
 - 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
- 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
- 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

- 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - 500.18.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
 - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
 - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
 - 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
 - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
 - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
 - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
- 500.18.4 Fasilitas Penempatan Transmigrasi
 - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
 - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
 - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
 - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
 - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
 - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
 - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
 - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
 - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
 - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
 - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat

- 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
 - 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
 - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
 - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
 - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
 - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
 - 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi
 - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
 - 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
 - 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
 - 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
 - 600.1 PEKERJAAN UMUM
 - 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
 - 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
 - 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	

- 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
 - 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
 - 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
 - 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
 - 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
 - 600.1.14.5 Kelembagaan
 - 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
 - 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
 - 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
 - 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
 - 600.1.15.5 Kelembagaan
 - 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
 - 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
 - 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
 - 600.1.16.5 Kelembagaan
 - 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
 - 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
 - 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
 - 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
 - 600.1.17.5 Kelembagaan
 - 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
 - 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi
- 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
 - 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
 - 600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan
600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
600.2.5.2	Analisa Teknik
600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun
600.2.6.1	Perencanaan Teknik
600.2.6.2	Penyediaan
600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus
600.2.7.1	Perencanaan Teknik
600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
600.2.7.5	Perencanaan Teknik
600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
600.2.8.1	Perencanaan Teknik
600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur
600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema

			Pembiayaan		
	600.2.18.5	Sinkronisasi	Program	dan	
		Pembiayaan	Infrastruktur		
		Perumahan Rakyat (PUPR)			
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi				
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)				
600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah				
600.3.2	Perencanaan				
	600.3.2.1	Tata Ruang	Wilayah	Kabupaten	
		(RT/RW)			
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)			
	600.3.2.3	Rencana	Tata	Ruang	
		Strategis Kabupaten			
	600.3.2.4	Rencana	Tata	Bangun	
		Lingkungan (RTBL)			
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten			
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota			
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota			
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian				
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang			
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang			
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang			
600.3.4	Pemetaan				
	600.3.4.1	Peta Dasar			
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat			
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air			
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara			
600.4	LINGKUNGAN HIDUP				
600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
	600.4.2.1	Inventarisasi,	Penerapan		
		ekoregion,	dan	rencana	
		perlindungan dan pengelolaan Lingkungan			
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam			
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan			
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup			
600.4.4	Ekonomi Lingkungan				
600.4.5	Dampak Lingkungan				

	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6		Pemantauan dan Pengawasan
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7		Evaluasi dan Pengembangan
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8		Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan

	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15		Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19		Komunikasi Lingkungan
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24		Kelembagaan Lingkungan
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan

		Minimal
600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	
600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	
600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	
600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	
700	PENGAWASAN	
700.1	PENGAWASAN INTERNAL	
700.1.1	Rencana Pengawasan	
700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	
700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	
700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	
700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	
700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	
700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	

		700.1.2.9	dan Review Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN		
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA	
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN	
	800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	
	800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantuan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan	

		Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN
800.1.3.2		Kenaikan
		Pangkat/Golongan/Jabatan
800.1.3.3		Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
		Struktural/Fungsional
800.1.3.4		Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai
800.1.3.5		Peninjauan Masa Kerja
800.1.3.6		Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4		Pengembangan Karir
800.1.4.1		Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
800.1.4.2		Penyesuaian ijazah
800.1.4.3		Penyusunan Sistem Karier
800.1.4.4		Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
800.1.4.5		Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara
800.1.5.1		Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
800.1.5.2		Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
800.1.5.3		Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800.1.6.1		Kode Etik Pegawai
800.1.6.2		Disiplin
800.1.6.3		Pemberhentian Dengan Hormat
800.1.6.4		Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
800.1.6.5		Pemberhentian Sementara
800.1.6.6		Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7		Bantuan Hukum
800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai

	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10		Pengawasan dan pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11		Administrasi Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan

	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13		Administrasi Perseorangan
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14		Penilaian Kompetensi
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
	800.2.2.4	Modul-modul diklat
	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/ Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3		Widyaiswara
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4	Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.2	Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5	Sistem informasi diklat
800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni
900	KEUANGAN
900.1	KEUANGAN DAERAH
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
900.1.3.2	Pendapatan
900.1.3.3	Belanja

	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar

	Negeri (PHLN)
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan /Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900.1.7.3	Buku Rekening Bank
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

- 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
- 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal

	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12		Anggaran Daerah
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13		Pendapatan dan Investasi Daerah
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga nonkeuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah

- Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
- 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan Pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
- 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan
- 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
- 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
- 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan

- monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
- 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
- 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
- 900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis dibidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangandaerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- 900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan

Keterangan Ahli Antara lain:
Penyiapan bahan bantuan
keterangan ahli di bidang
keuangan daerah, Penyiapan
evaluasi rancangan peraturan
daerah pertanggungjawaban
keuangan daerah

- 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Antara lain:
Penyiapan sinkronisasi kebijakan
pelaksanaan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan daerah,
Penyiapan data dan informasi
untuk penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan daerah, Pengelolaan
sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004